

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125/KPTS/1991
TANGGAL : 1 APRIL 1991**

Tentang

**PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125/KPTS/1991

tentang

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR -
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenteram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar – Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 April 1991

PEJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ttd

PAKU ALAM VIII

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi DIY;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Propinsi DIY;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Propinsi DIY;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan

Sesuai dengan Aslinya

Salinannya, 20 September 2004

Salinannya, Dinas Pendidikan Samigaluh



SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125/KPTS/1991

TENTANG

PENGUKUHAN/PENGUKUHAN KEMBALI DAN PEMBERIAN WEWENANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM RANGKA
PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
SEKOLAH DASAR - SEKOLAH DASAR YANG MENJADI WEWENANG
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI D I Y

C. KABUPATEN KULON PROGO

RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN SAMIGALUH

NO.	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO.	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI KEBONHARJO	1.	SD MUHAMMADIYAH MUNGANG WETAN
2.	SD NEGERI JUMBLANGAN	2.	SD KRISTEN MARANATHA
3.	SD NEGERI BENDO	3.	SD PANGUDILUHUR KALIREJO
4.	SD NEGERI BALONG I	4.	SD MUHAMMADIYAH JARAKAN
5.	SD NEGERI BALONG II		
6.	SD NEGERI BANJARSARI		
7.	SD NEGERI KALIREJO		
8.	SD NEGERI PAGERHARJO		
9.	SD NEGERI NGALIYAN		
10.	SD NEGERI NGARGOSARI		
11.	SD NEGERI SAMIGALUH I		
12.	SD NEGERI SAMIGALUH II		
13.	SD NEGERI MENGGERMALANG		
14.	SD NEGERI KEMIRIOMBO		
15.	SD NEGERI GERBOSARI		
16.	SD NEGERI SUMOROTO		
17.	SD NEGERI MADIGONDO		
18.	SD NEGERI SULUR		
19.	SD NEGERI SIDOHARJO		
20.	SD NEGERI TUKHARJO		
21.	SD NEGERI KLEPU		
22.	SD NEGERI PURWOHARJO		
23.	SD NEGERI TOTOGAN		
24.	SD NEGERI KAYUGEDE		
25.	SD NEGERI GEGERBAJING		
26.	SD NEGERI MADIGONDO WETAN		
27.	SD NEGERI GUNUNGKUCIR		
28.	SD NEGERI TRAYU		
29.	SD NEGERI SARIGONO		
30.	SD NEGERI SUROLOYO		